

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan kesiapan pada empat nagari di Kecamatan Batang Anai dalam pengelolaan dana desa melalui analisis kesiapan sisi administrasi terkait siklus pengelolaan dana desa dan kesiapan faktor-faktor pendukung pengelolaan dana desa diperoleh persentase masing-masing pemerintah desa di Kecamatan Batang Anai yaitu Nagari Ketaping dengan 75%, Nagari Kasang 69,12%, Nagari Sungai Buluh 76,47% dan Nagari Buayan Lubuk Alung 75%. Dapat disimpulkan bahwa seluruh pemerintah desa di Kecamatan Batang Anai termasuk dalam kategori siap dalam mengelola dana sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang walaupun terdapat satu parameter dengan rata-rata persentase termasuk kategori kurang siap dan satu parameter dengan rata-rata parameter termasuk kategori belum siap, namun apabila dilihat secara keseluruhan dapat dikatakan telah siap. Berikut rincian capaian tingkat kesiapan tiap-tiap parameter:

1. Kesiapan sisi administrasi terkait siklus pengelolaan dana desa, yang terdiri dari:
  - a. Perencanaan dengan rata-rata persentase capaian kesiapan nagari 80,77% dikategorikan sangat siap, nagari Ketaping dan Sungai Buluh terpaut sedikit di bawah rata-rata, serta dua nagari lainnya di atas rata-rata.

- b. Pelaksanaan dengan rata-rata persentase capaian kesiapan nagari 95,45% dikategorikan sangat siap, dua nagari memperoleh 100%, nagari Kasang dan Buayan Lubuk Alung memperoleh 90,91%.
  - c. Penatausahaan dengan rata-rata persentase capaian kesiapan nagari 71,88% dikategorikan siap, dan tiga nagari selain Kasang berada di atas rata-rata.
  - d. Pelaporan dengan rata-rata persentase capaian kesiapan nagari 50% dikategorikan kurang siap, persentase terendah diperoleh nagari Kasang, dan tiga nagari lainnya sedikit di atas rata-rata.
  - e. Pertanggungjawaban dengan rata-rata persentase capaian kesiapan nagari 62,50% dikategorikan hampir siap, dan tiga nagari memperoleh persentase yang sama di atas rata-rata selain nagari Buayan Lubuk Alung.
2. Kesiapan faktir-faktor pendukung pengelolaan dana desa, yang terdiri dari:
- a. Komitmen organisasi dengan persentase capaian kesiapan nagari merata 87,50% dikategorikan sangat siap.
  - b. Sumber daya manusia dengan rata-rata persentase capaian kesiapan nagari 82,50% dikategorikan sangat siap, persentase nagari Sungai Buluh dan Buayan Lubuk Alung di atas rata-rata, serta 2 nagari lainnya terpaut sedikit di bawah rata-rata.
  - c. Sistem Informasi dengan persentase capaian kesiapan nagari merata 20% dikategorikan belum siap.

## **5.2. Keterbatasan Penulisan**

Penelitian dilakukan pada bulan September 2016. Pada saat dilakukan penelitian, pencairan dan penggunaan dana desa masih tahap I. Pengelolaan dana desa baru dilaksanakan sampai tahap pelaporan realisasi tahap I. Jadi, pengukuran beberapa parameter juga dilakukan berdasarkan hasil pelaporan akhir Tahun 2015.

### 5.3. Saran

Dari hasil analisis dan wawancara penelitian, agar pemerintah desa pada nagari-nagari di Kecamatan Batang Anai lebih mantap dan baik dalam mengelola dana desa, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat dalam menetapkan peraturan yang mana harus diturunkan ke dalam peraturan daerah yang berpengaruh langsung sampai peraturan nagari terbit pada waktu yang tidak mendesak dan tidak mengganggu alur pengelolaan keuangan desa. Selain itu, perlu peraturan ataupun pedoman yang lebih rinci seperti contohnya Pemerintah Nagari mengeluarkan pedoman teknis yang ada sampai saat ini belum terlalu rinci, contohnya dalam hal kodefikasi bagan akun standar (BAS) untuk sistem pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa didalamnya belum diatur, sehingga pengkodean dalam laporan-laporan tiap nagari seragam.
2. Pemerintah Daerah perlu melakukan pembaharuan peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan peraturan pemerintah pusat.
3. Pemerintah Nagari perlu melakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan selain unsur inti perangkat nagari (wali nagari, sekretaris, maupun bendahara) yaitu terhadap pelaksana-pelaksana teknis khususnya mengenai pembuatan rincian anggaran dan pengelolaan dana desa umumnya, agar pemahaman tiap perangkat nagari lebih merata dan menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan pekerjaan sesuai tupoksi masing-masing. Juga diperlukan penyesuaian kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan aturan yang ada.

4. Pemerintah Nagari perlu membuat laporan kekayaan milik nagari yang terdiri dari laporan kekayaan nagari yang dimiliki oleh KAN dan kekayaan pemerintahan nagari, untuk selanjutnya dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban APB Nagari.
5. Pemerintah Nagari perlu mengimplementasi penggunaan suatu sistem aplikasi yang terintegrasi untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaan dana desa, yang dapat dibuat sendiri oleh pemerintah daerah maupun yang telah dibangun pemerintah pusat. Contoh aplikasi yang pernah disosialisasikan kepada nagari-nagari yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang merupakan produk kerjasama BPKP dan Kemendagri.

